



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/362 /PDG/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat terbuka dan diakses oleh setiap pengguna informasi publik dapat dikecualikan karena bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 90);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 April 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/362 /PDG/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	RINGKASAN INFORMASI	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA PENGECUALIAN	ALASAN PENGECUALIAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftar Rekening Bank Pegawai	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
2	Riwayat Kesehatan	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
3	Berkas Kepegawaian	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal SK
4	Perusahaan Pemenang Tender	Setiap Perangkat Daerah	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Satu Tahun

5	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
6	Laporan Keuangan Sebelum Diaudit	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
7	Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
8	Nota Dinas	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
9	Laporan Hasil Rapat	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Paling Lama 30 Tahun	Dapat mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Sesuai tanggal
10	Laporan Hasil Pengawasan Termasuk Surat Pengantar Masalah dan Surat Penegasan				
	a. Audit	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
	b. Reviu	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
	c. Evaluasi	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal

			jabatan publik		
	d. Pemantauan	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
	e. Pengawasan Lainnya	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
11	Kertas Kerja Pengawasan (Seluruh Dokumen yang Mendukung LHP)	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun; Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
12	SK Hukuman Disiplin	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
13	SK Izin Perkawinan	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

14	SK Kenaikan Pangkat	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
15	SK Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
16	SK Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
17	SK Pengangkatan CPNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
18	SK Pengangkatan PNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

19	SK Penyesuaian Gaji Pokok	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
20	SK Pemindahan Pegawai	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN